BAB II
RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Perusahaan

Sejalan dengan perkembangan masa pemerintahan Republik Indonesia, PT Pos Indonesia mengalami beberapa kali perubahan bentuk usaha yang meliputi:

1. Dinas Pos sebagai Jawatan (1864)

   Pada tahun 1864 Dinas Pos Sebagai Jawatan berada di bawah pengawasan *Directur Producten en Civiele Magazijnen.* Pengawasan ini beralih pada tahun 1967, yaitu kepada Departemen Pangreh Praja. Berdasarkan Stbl.1867 Nomor 4, Dinas Pos disatukan dengan Dinas Telegraf yang tetap berstatus Jawatan dengan nama *Post en Telegraafdients in Ned Indie,* sementara penggabungannya sendiri baru terlaksana pada tahun 1884 berdasarkan Stbl.1884 Nomor 52 Jawatan Pos dan Telegraf disatukan dengan Jawatan Telepon. Pada tahun 1906 dengan berdasarkan ketetapan Stbl.Nomor 395, disebut *Pos Telegraaf en Telefoondenst*(PTT).

2. Dinas Pos sebagai Perusahaan ICW (1906)

   PTT termasuk perusahaan ICW (*Indische Coptabilities Wet)* karena cara kepengurusan dan pertanggungjawaban keuangannya berada di bawah ICW. Selain itu juga merupakan kesatuan organisasi produksi yang diselenggarakan pemerintah, tidak bersifat komersial, berfungsi sebagai

lembaga pemerintah yang anggaran belanjanya menjadi satu dengan anggaran belanja departemen yang membawahinya.



3. Dinas Pos sebagai Perusahaan IBW (1913 – 1961)

   Pada tahun 1913, berdasarkan Stbl.1913 Nomo 524 PTT diubah statusnya menjadi perusahan IBW (*Indische Bedrijen Wet)* karena sebagai perusahaan ICW dianggap kurang lincah dan kurang cepat. Perusahaan IBW diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan ketentukan IBW. Perusahaan dalam IBW diatur dengan Stbl.1938 Nomor 455, lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Pengawasan barang dan uang perusahaan IBW dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan, sementara anggaran belanja perusahaan masuk ke dalam anggaran belanja negara yang disahkan oleh DPR.

4. Dinas Pos sebagai Perusahaan Negara (1961 – 1965)

   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 19 Tahun 1960 semua perudahaan yang modalnya merupkan kekayaan Negara menjadi perusahaan negara, termasuk Perusahaan Jawatan PTT yang dilebur adalah Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PNPOSTEL) tercantum dalam lembaran Negara tahun 1961 Nomor 306. Hak dan kewajiban, perlengkapan serta usaha dari Perusahaan Jawatan PTT beralih kepada PN POSTEL berdasarkan PP Nomor 240 Tahun 1961. PN POSTEL berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung dan mempunyai cabang di seluruh Indonesia. Segala hokum

Indonesia berlaku pada perusahaan ini, sementara lapangan usahannya di idang penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi.

5. Dinas Pos sebagai Perusahaan Negara Pos dan Giro (1965 – 1978)

   Pada tahun 1965 agar PN POSTEL mencapai daya guna dan daya gerak setinggi-tingginya maka didirikan PN POS yang terpisah dari PN Telekomunikasi, masing-masing dengan PP yang berlainan. PN Pos dan Giro adalah badan hukum yang bergerak melakukan usaha-usaha dalam lapangan penyelenggaraan Pos dan Giro. Kantor Pusatnya berkedudukan di Bandung, dengan pertimbangan telah ada kantor dan perlengkapan lainnya. Tujuan pendiriannya untuk turut membangun ekonomi nasional dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.

6. Dinas Pos sebagai Perum Pos dan Giro (1978 – 20 Juni 1995)

   Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Yahun 1969 yang menetapkan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Perjan, Perum dan Persero maka status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro, berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1978 dengan PP Nomor 3 tahun 1983 ditetapkan dengan cara pengawasan dan pembinaan Perjan, Perum dan Persero. Untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru ini PP Nomor 9 Tahun 1978 yang mengatur tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro telah diganti dengan PP Nomor 24 Tahun 1984.

7. Dinas Pos sebagai PT POS INDONESIA (Sejak 20 Juni 1995 – Sekarang)

Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995, Perum Pos dan Giro berubah status menjadi PT POS INDONESIA (Persero) sejak tanggal 20 Junidengan Akta Notaris Sutjipto,SH. Nomor 89 tanggal tahun 1995, yang kemudian diubah menjadi Akta Notaris Sutjipto,SH. Nomor 89 tanggal 21 Septeber 1998 dan Nomor 111 tanggal 28 Oktober 1998. Perusahaan Perseroan (Persero) PT POS INDONESIA, berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung. Pada pasal 3 Akta Notaris Tersebut diterangkan:

a. Tujuan Perseroan untuk menyelenggarakan usaha pelayanan jasa Pos dan Giro bagi Masyarakat baik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia, dalam rangka turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program pemerintah.
b. Lapangan usahanya adalah penyelenggaraan dan pelayanan Pos dan Giro Pos, serta usaha-usaha lainnya yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa Pos dan Giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Perencanaan pembangunan dan pengembangan pelayanan, sarana dan fasilitas pelayanan Pos dan Giro.
d. Melakukan kerja sama dengan badan lain atau pihak lain baik dalam maupun luat negeri di bidang pembangunan, pengembangan operasional, keuangan, sumber daya manusia, perencanaan dan penelitian atau di bidang lain yang dianggap perlu untuk menunjang

usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Perseroan dapat mendirikan ataumenjalankan anak perusahaan dan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha.

f. Moda perusahaan perseroan yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam, dalam perusahaan umum Pos dan Giro.

g. Modal dasar perusahaan perseroan terdiri atas saham-saham sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 24 tahun 1972.

h. Neraca pembukuan perusahaan perseroan ditetapkan oleh mentri keuangan.

2.2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Perusahaan tempat melaksanakan kerja praktek yaitu kantor pusat III PT. POS Indonesia (Persero) yang terletak di jalan Banda No.30.

2.3. Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

PT. POS Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipimpin oleh suatu direksi yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2.4. Bidang Pekerjaan Perusahaan

PT Pos Indonesia (Persero) mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang pelayanan jasa Pos dan Giro bagi masyarakat baik di dalam mauoun di luar wilayah Indonesia denagn menerapkan prinsip – prinsip Perseroan Terbatas (PT).

Pada Pokoknya usaha-usaha yang dijalankan oleh PT Pos Indonesia (Persero) adalah memberikan berbagai macam layanan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun layanan dan pelayanan Pos tersebut yaitu:

1. Surat Pos

   Pelayanan standar pengiriman berita yang tersedia di semua kantor pos dengan tarif seragam, baik untuk perhubungan di dalam maupun di luar negeri. Jenis surat pos meliputi: surat, kartu pos, warkat pos, barang cetakan, majalah, sekogram(Braille) dan bungkusan.

2. Surat Kilat

   Layanan untuk kiriman pos cepat di dalam negeri (*Express Mail)* yang menjangkau seluruh Indonesia dengan prioritas kecepatan dalam penyaluran dan pengantarannya.

3. Surat Kilat Khusus

Layanan yang terdokumentasi sebagai solusi tepat kiriman pos di dalam negeri dengan fasilitas jejak lacak, guna mengetahui satus kiriman. Waktu tempuh antara 24 jam sampai dengan 48 jam.

4. Express Mail Services (EMS)

   Layanan cepat pengiriman berita atau barang sebagai solusi tepat pengiriman pos internasional dengan fasilitas jejak lacak guna mengetahui status kiriman. Waktu tempuh antara satu sampai dengan tiga hari.

5. Ratron

   Layanan surat elektronik yang merupakan hibrida antara surata secara fisik dengan kombinasi transmisi data melalui jaringan telekomunikasi. Hasil transfer data berupa copy naskah asli akan diantarkan kepada alamat penerima dalam sampul tertutup dengan jaminan waktu tempuh maksimum 6 jam.

6. Ratron Simpati

   Layanan surat elektronik untuk berbagai ucapan simpati.

7. Surat Bisnis Elektronik

   Layanan hibrida antara transmisi data elektronik dengan antaran fisik surat pos.

8. Wesel Pos

Layanan transfer uang sebagai solusi kiriman uang ke seluruh Indonesia. Tersedia beberapa jenis pelayanan tambahan untuk wesel pos yaitu: wesel pos kilat khusus, wesel pos elektronik (westron), wesel pos berlangganan, wesel pos tebusan dan wesel pos luar negeri ke/dari beberapa negara.

9. Giro Pos

Layanan keuangan untuk menampung, penyimpanan dan pembayaran berbagai transaksi, baik untuk pemegang rekening perorangan maupun perusahaan serta keperluan bisnis di seluruh Indonesia.

10. Cek Pos Wisata (CPW)

Layanan keuangan sebagai solusi dana perjalanan karena dapat diuangkan di semua kantor pos. Tersedia beberapa harga nominal CPW dari Rp.10.000,- sampai dengan Rp.25.000,-. Beberapa hotel, restoran, travel biro dan tempat-tempat lainnya menerima CPW sebagai alat pembayaran.

11. Paket Pos

Layanan untuk pengiriman barang yang dapat dilakukan di semua kantor pos, baik untuk perhubungan dosmetik maupun internasional.

12. Belanja Lewat Pos (BLP)

PT Pos Indonesia (Persero) bekerja sama dengan mitra kerja menyediakan layanan BLP (Mail Order) sebagai solusi belanja jarak jauh berbagai produk. Manfaat bagi konsumen adalah mendapatkan produk-prodik pilihan dengan harga yang sama di seluruh Indonesia. Deskripsi dan ilustrasi produk digelar dalam katalog/brosur yang diterbitkan secara berkala. BLP juga memberikan manfaat yang positif bagi produsen. Melalui BLP dapat langsung mengakses pasar nasional tanpa harus membangun jaringan distribusi sendiri.

13. Pos Plus

Berbagai layanan dengan nilai tambah yang dikemas melalui sarana pelayanan pos plus sehingga dapat memberikan solusi untuk semua jenis kiriman pos.

14. Filateli

Dalam upaya meningkatka kualitas dan memperkaya khazanah hobi mengumpulkan prangko atau filateli, telah dikembangkan pula produk filateli yang lebih atraktif dengan tema penerbitan yang bervariasi. Menyadari bahwa filateli adalah berada koleksi yang banyak diminati para penggemarnya, maka usaha bisnis filateli telah ditangani oleh suatu divisi agar lebih fleksibeldan akrab dalam melangkah bersama filatelis dan masyarakat.

15. Wasantara -- Net (W-Net)

Layanan pertukaran informasi melalui internet sebagai solusi komunikasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

16. Pos Serba Ada (Poserba)

Poserba menyediakan semua kebutuhan yang berhubungan dengan pos dan berbagai alat tulis menulis termasuk kartu usapan dan benda filateli dalam kemasan khusus. Poserba berada di kantor Pos dan di tempat-tempat lain yang letaknya strategis.

17. Pos Pemasaran Keliling

Pos pemasaran keliling memiliki kapasitas pelayanan pengantar pos selain mengantarkan kiriman pos juga ditambah dengan pelayanan kebutuhan pos lainnya, seperti: penjualan benda pos dan materai, penerimaan kiriman pos dan lain-lain sehingga lebih mendekatkan layanan pos kepada masyarakat setiap hari dengan sepeda motor dan seragam khas serta dilengkapi dengan bunyi melodi yang menandai kehadiran posarling yang siap untuk memberikan berbagai pelayanan pos.

18. Halo Pos 161

Halo Pos 161 digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi layanan kepada seluruh penguna jasa pos. Fasilitas ini ditujukan agar pelanggan dapat menghemat waktu, biaya dan upaya untuk memperoleh

informasi seluas-luasnya tentang pelayanan jasa pos. Pengguna fasilitas Halo Poa 161 ini hanya cukup memutar nomor telepon 161.

19. Layanan Keagenan

Pelayanan jasa keagenan dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) untuk kepentingan pihak ke tiga, yang meliputi: penabungan dan pembayaran untuk Bank Tabungan Negara, pemotongan pensiunan eks Bank Kreditur, pembayaran pensiun TASPEN dan ASABRI, serta penjualan benda materai untuk Direktorat Pajak.

2.5. Bidang Pekerjaan Divisi/Departemen Tempat Kerja Praktek

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang besar, maka dari itu tempat kerja praktek dilaksanakan di bagian jaringan virtual. Seperti yang telah dituliskan di sub bab berikutnya tentang struktur organisasi, disana bisa dilihat bahwa struktur umum perusahaan terbagi dalam empat bagian direktorat diantaranya adalah direktorat pranteksar(divisi perencanaan, teknik dan sarana), direktorat SDM (sumber daya manusia), direktorat keuangan dan direktorat operasi. Direktorat pranteksar membawahi tiga sub direktorat yaitu sub direktorat jaringan, sub direktorat teknik dan sub direktorat sarana. Sedangkan bagian jaringan virtual sendiri berada di bawah sub direktorat jaringan.

Fungsi bagian jaringan virtual (KD. 36/DIRUT/0703) adalah sebagai berikut:

- Penyedia Solusi Jaringan berkualitas, aman, efektif dan efisien
- Menjadi penghubung jaringan (fisik) yang ada
- Mendukung proses operasional perusahaan

Tugas bagian jaringan virtual (1) (KD. 36/DIRUT/0703) Adalah sebagai berikut:

- Mengelola, memelihara dan mengembangkan jaringan virtual
- Melakukan set-up jaringan virtual
- Melakukan penanganan gangguan jaringan virtual dan terminalnya.
- Memelihara jaringan virtual dan terminalnya
- Memonitor, mengevaluasi dan membuat laporan performansi jaringan virtual
- Melakukan riset pengembagan alternatif solusi teknologi jaringan virtual

Tugas bagian jaringan virtual (2) (KD. 36/DIRUT/0703)

- Melakukan proses administrasi dan dokumentasi jaringan virtual nasional
- Mengidentifikasi kebutuhan pengembagan SDM Bagian Jaringan Virtual
- Menyusun rencana kerja dan anggaran
- Mengelola sumber daya di Bagian Jaringan Virtual

Tugas harian:

1. Melakukan monitoring traffic jaringan kantor pusat

2. Melakukan monitoring koneksi:
    a. Jaringan kantor pusat-3 dengan prosedur ping dan/atau remote serta mengisi buku pengawasan jaringan
    b. Jaringan Data Center Bandung dan Jakarta dengan prosedur ping dan/atau remote serta mengisi buku pengawasan jaringan
    c. Jaringan dengan media koneksi Radio Link di Kantor Pusat-1, Kantor Pusat-2, Kantor Palpos-Bankaen-Prangmet, Knator Wilpos IV Bandung, Kantor SPP Bandung 40000, Kantor Pos Kosambi dan Kantor Pos Ujungberung dengan prosedur ping dan/atau remote serta mengisi buku pengawasan jaringan
3. Melakukan monitoring, helpdesk dan maintenance jaringan VPN Pos Indonesia secara nasional dengan prosedur chatting dan email
4. Melakukan monitoring server VPN di semua UPT yang online (dedicated) dengan metode remote server
5. Menjawab dan mengadministrasikan surat menyurat (surat masuk dan surat keluar) di bagian NOC
6. Melakukan proses kajian dan upgrade knowledge perkembangan teknologi dan perkembangan jaringan virtual

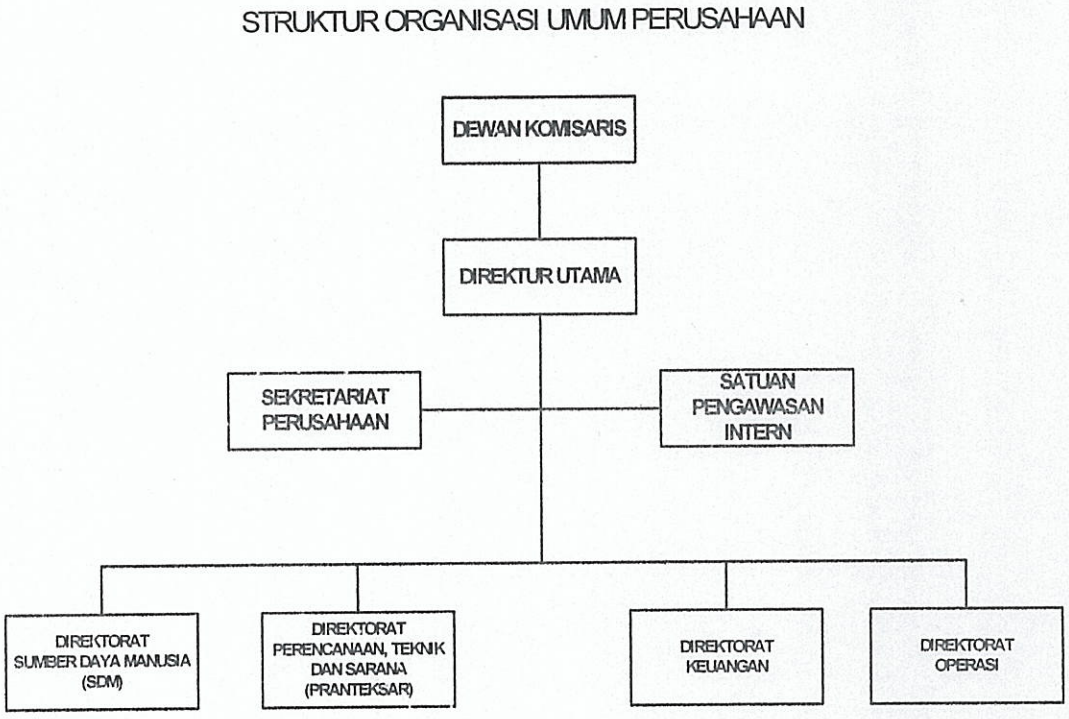
Tugas insidentil:

1. Melakukan pengawasan dan maintenance mesin server jaringan (MIRC server, radius server, web server, mail server, FTP server, Proxy Server, Sock Server) yang berada di Data Center Bandung dan Jakarta

2. Melakukan Troubleshooting jaringan on the spot di kantor pusat-1, kantor pusat-2, Kantor Pusat-3, Kantor Palpos-Bankaen-Prangmet, Knator Wilpos IV Bandung, Kantor SPP Bandung 40000, Kantor Pos Kosambi dan Kantor Pos Ujungberung
3. Melakukan Troubleshooting jaringan di Data Center Bandung dan Jakarta
4. Melakukan kajian dan analisis teknologi jaringan (perangkat keras dan perangkat lunak jaringan) untuk kebutuhan jaringan yang aman handal dan terpercaya
5. Melakukan tugas dan fungsinya sebagai administrator e-mail (melakukan proses create, update dan delete) untuk domain posindonesia.co.id
6. Memberikan bantuan dan dukungan kepada bagian lalin yang memiliki atau menyimpan perangkat servernya di Data Center
7. Melakukan pengembangan sistem dan kebijakan jaringan.

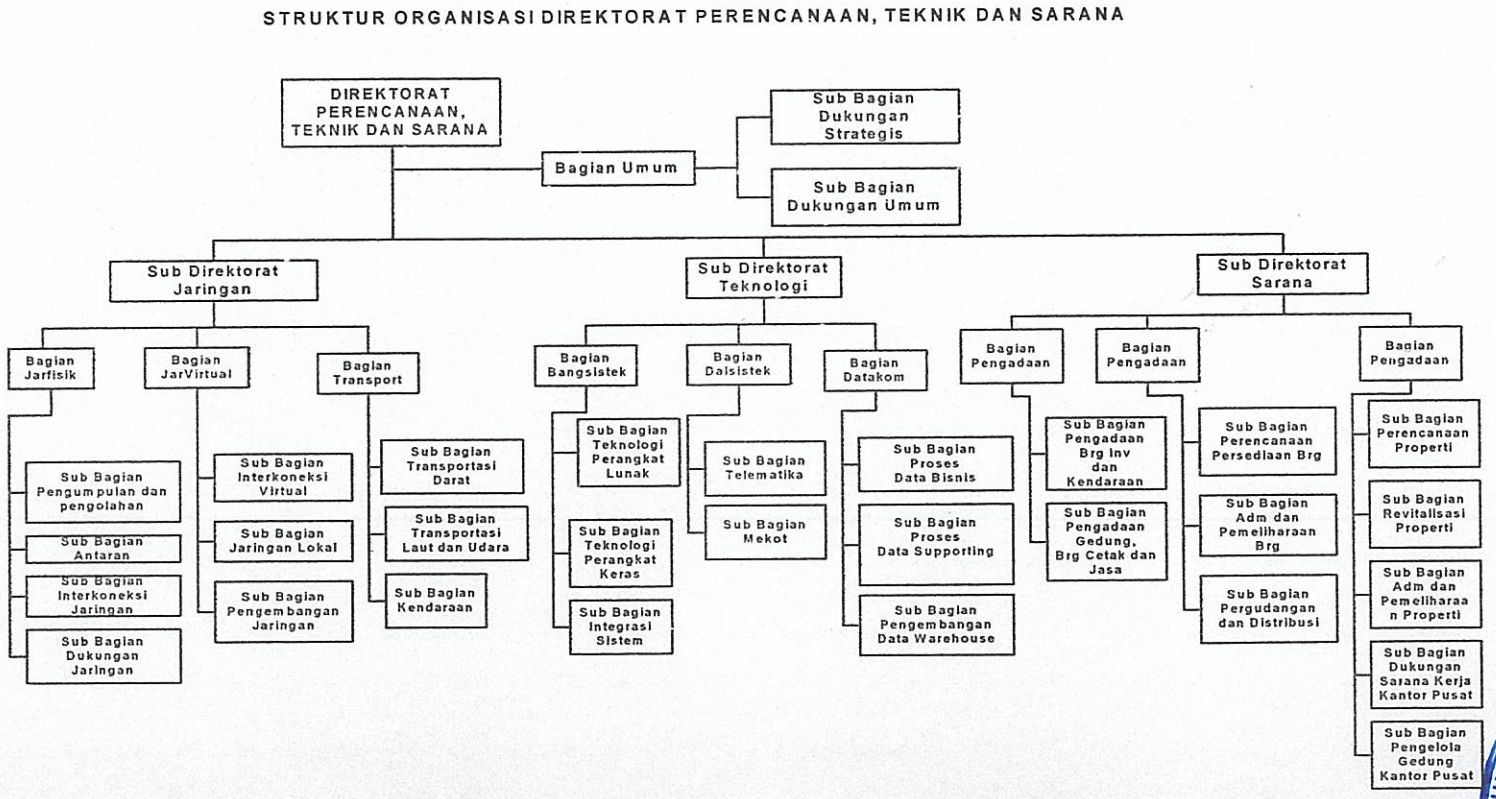
2.6. Struktur Organisasi Perusahaan

2.6.1. Struktur Organisasi Umum Perusahaan



Gambar 2.1 Struktur organisasi umum perusahaan

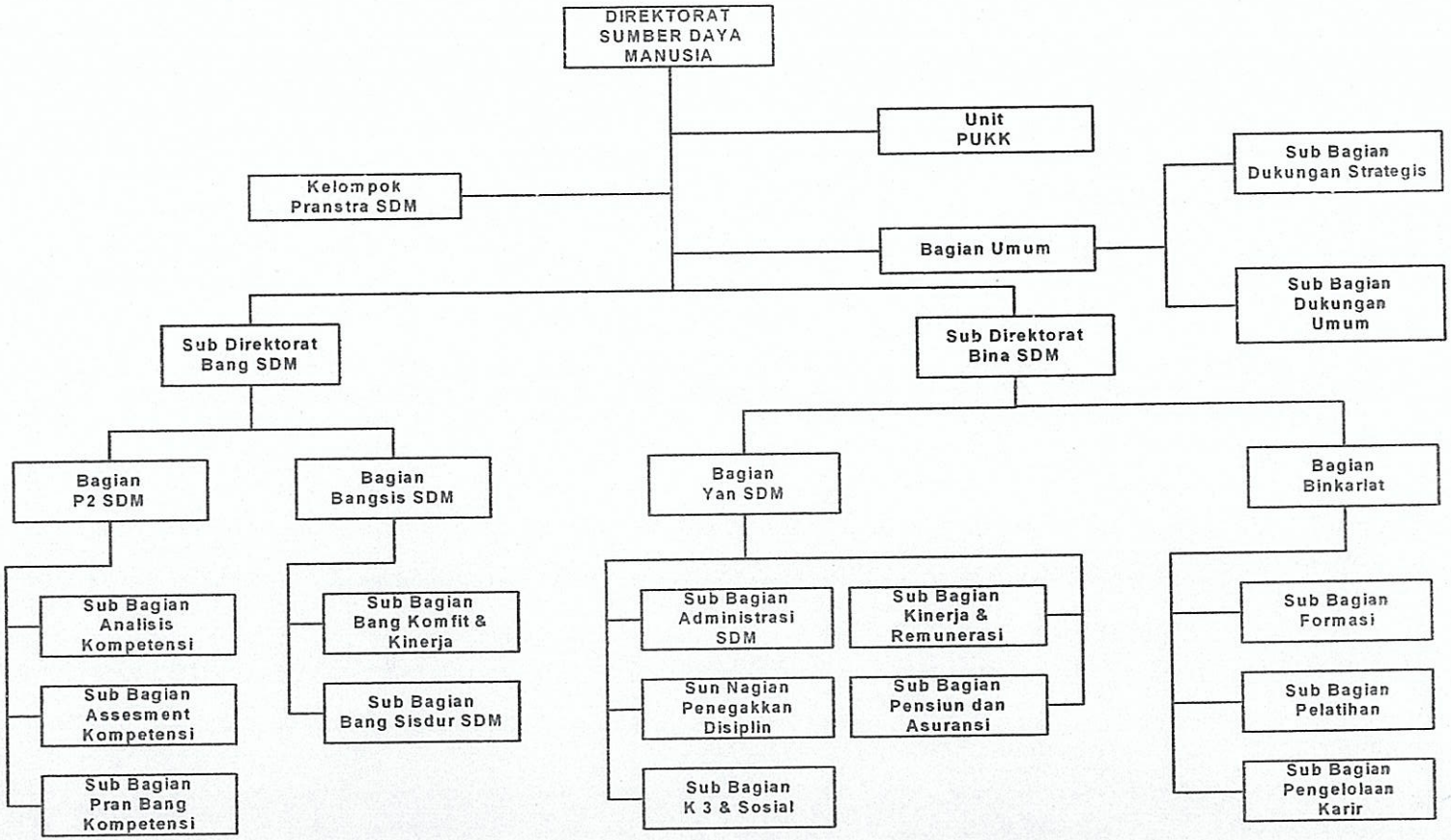
2.6.2. Struktur Organisasi Direktorat Pranteksar (Perencanaan, Teknik dan Sarana)



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Direktorat Pranteksar

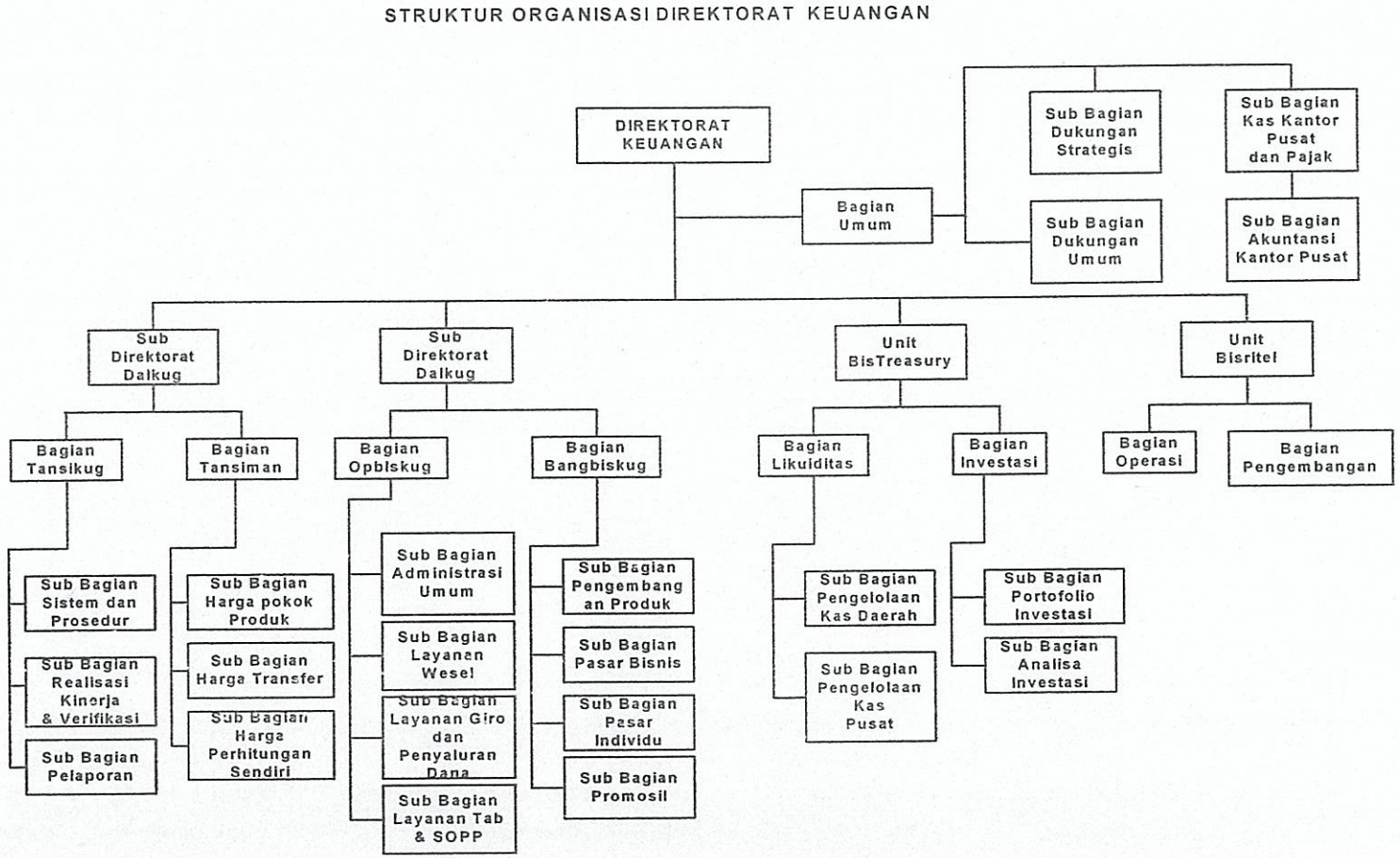
2.6.3. Struktur Organisasi Direktorat SDM (Sumber Daya Manusia)

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA



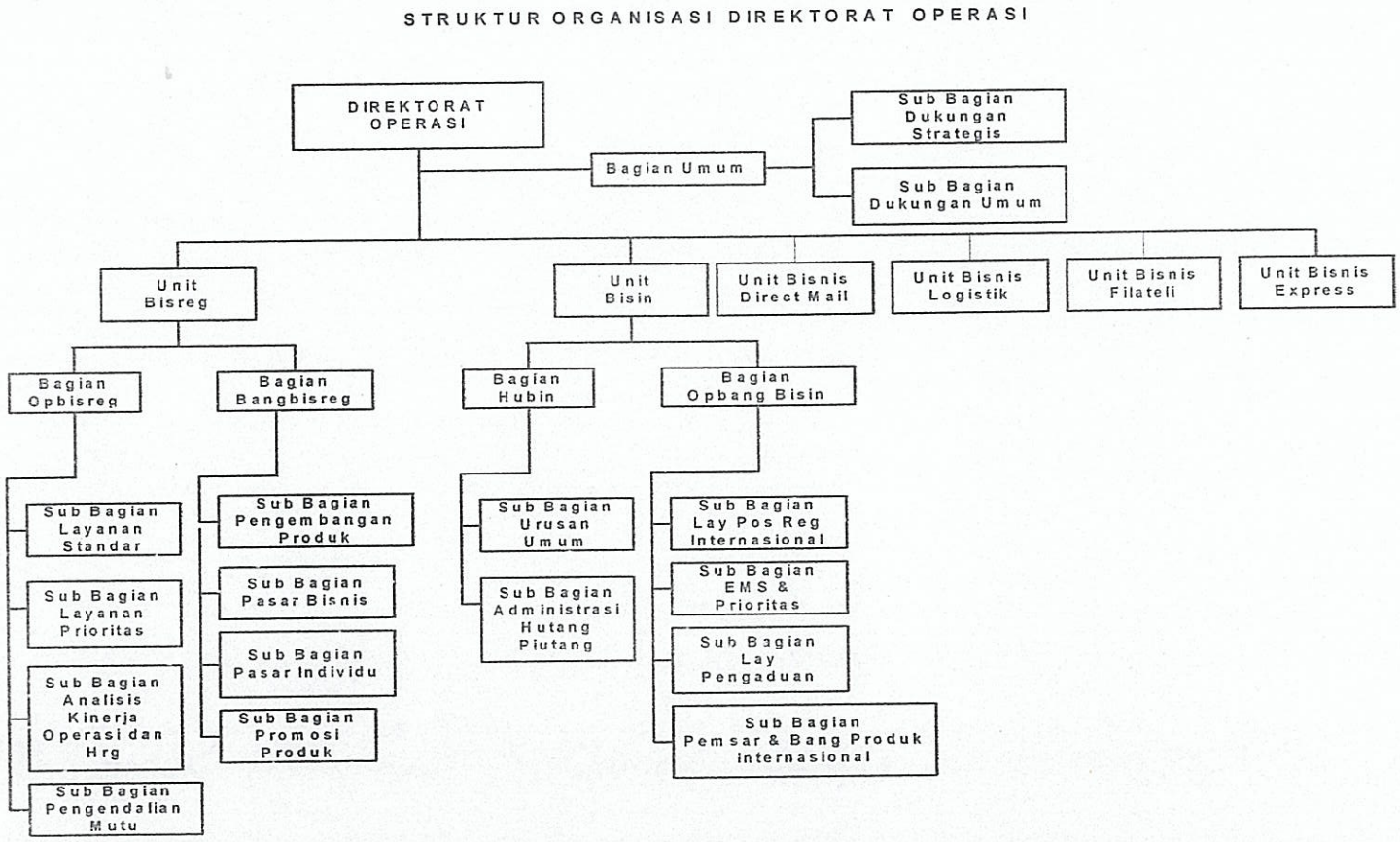
Gambar 2.3. Struktur Organisasi Direktorat SDM

2.6.4. Struktur Organisasi Direktorat Keuangan



Gambar 2.4. Struktur Organisasi Direktorat Keuangan

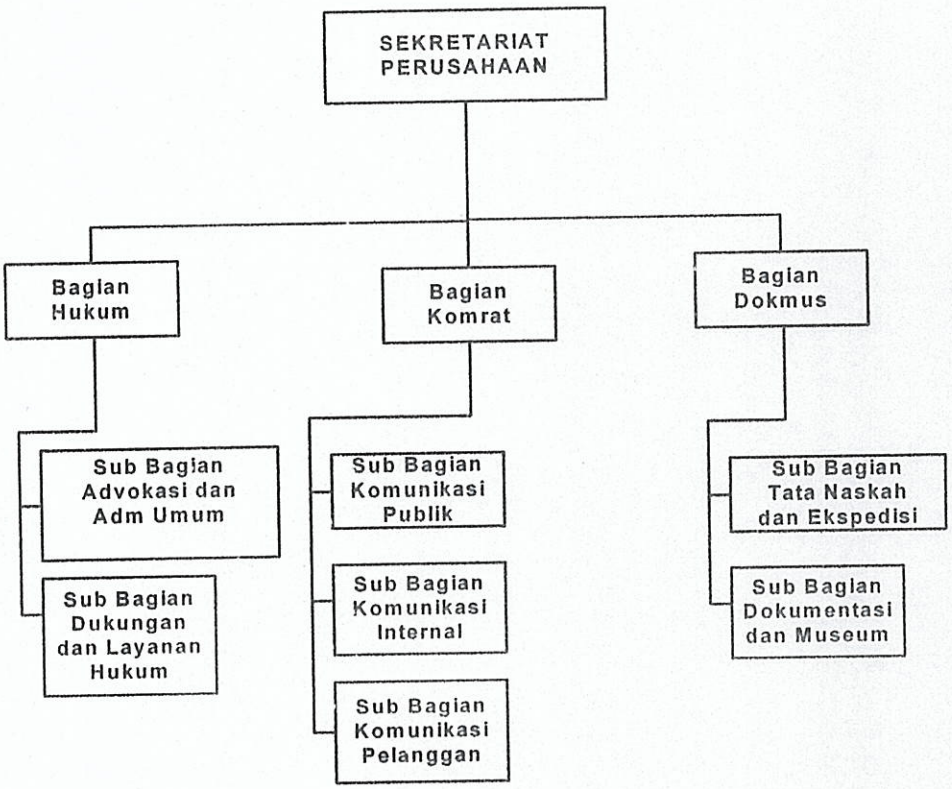
2.6.5. Struktur Organisasi Direktorat Operasi



Gambar 2.5. Struktur Organisasi Direktorat Operasi

2.6.6. Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan

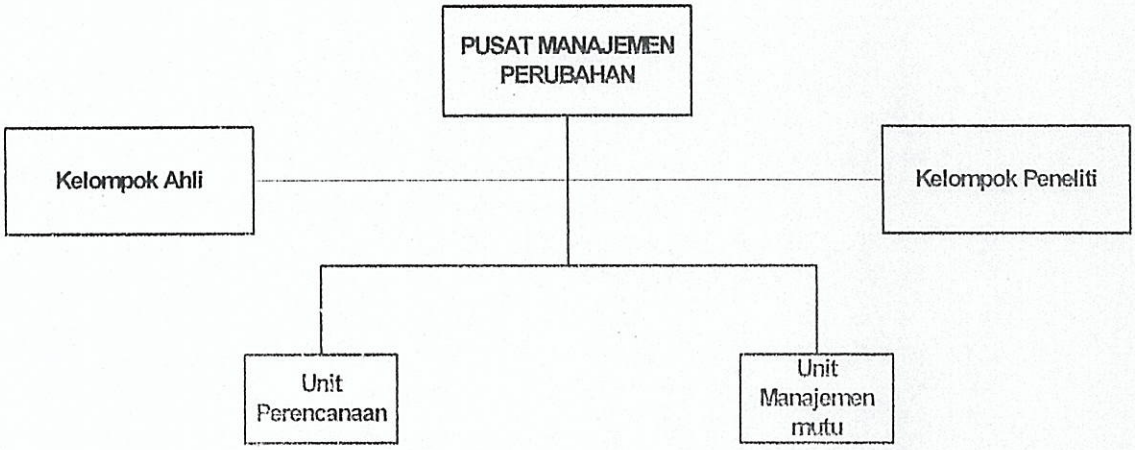
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

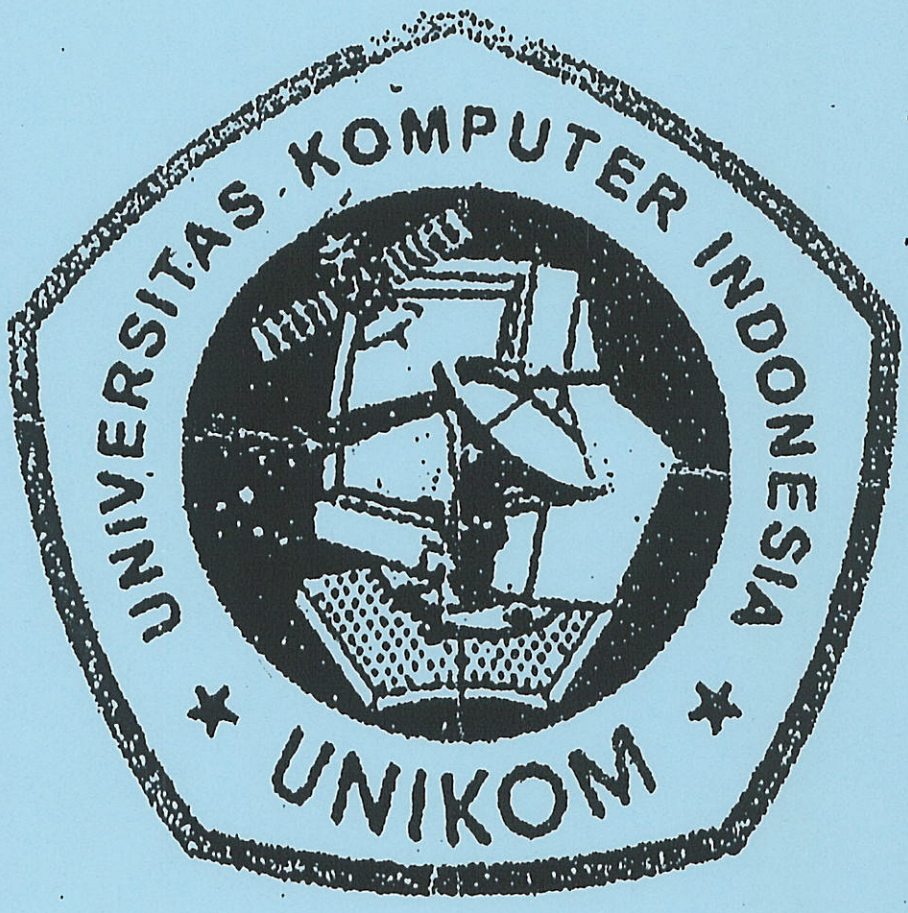


2.6. Gambar Struktur Organisasi Sekertariat Perusahaan

2.6.8. Struktur Organisasi Pusat Managemen Perusahaan

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT MANAJEMEN PERUSAHAAN




UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM